

Jakarta
15 Maret 2017



SINERGI PEMBANGUNAN SANITASI DALAM PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH

Direktorat Perkotaan, Perumahan dan Permukiman
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS

PERHATIAN PADA SEKTOR PKP MASIH PERLU DITINGKATKAN



Pasal 31 Ayat 1

Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan

Memperoleh sekurang-kurangnya **20% APBN dan APBD** untuk penyelenggaraan pendidikan



Pasal 28 H Ayat 1

Setiap orang berhak memperoleh layanan kesehatan

Pasal 34 Ayat 3

Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan.....”

Diupayakan memperoleh alokasi sebesar **5% dari total APBN 2016** atau kurang lebih Rp100 Triliun



Pasal 28 H Ayat 1

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat

Perumahan mendapatkan **kurang dari 1% APBN maupun APBD**

“Perumahan bukanlah sebuah produk, namun sebuah proses. Perumahan bukan sesuatu yang dapat diselesaikan dalam satu waktu bergantung pada sebuah rencana, namun dibangun secara bertahap, sebagai kebutuhan rumah tangga dan perubahan sumber daya”
(UNESCAP)

Tidak memiliki
Rumah sama sekali

11,8juta
RUMAH TANGGA

Memiliki rumah lebih
dari satu

3,1juta
RUMAH TANGGA

3,4juta
RUMAH TANGGA

Tinggal di rumah
tidak layak huni

38,431
HEKTAR

Luas Kumuh
Perkotaan (2014)

Rusunawa Kumuh



Permukiman Kumuh



Rumah Tidak Layak



Rusunawa Terbengkalai



ISU YANG DIHADAPI

KECENDERUNGAN KE DEPAN (Perumahan Swadaya)



Rumah swadaya dibangun tanpa atau kurang pembinaan dan pengawasan
Tumbuh semakin tidak terkendali

Sekarang
Permukiman padat,
infrastruktur dasar tidak layak,
bangunan tidak beraturan.

MASA DEPAN?

Dahulu

Pertumbuhan Penduduk

Pembangunan Rumah dilakukan secara swadaya
Dibangun sesuai penguasaan lahan dan kemampuan masyarakat



PERUMAHAN FORMAL SEMAKIN MENJAUH DARI PUSAT KOTA

Komplek perumahan MBR dibangun jauh dari pusat kota tanpa dukungan infrastruktur yang memadai termasuk rencana jaringan air minum dan sanitasi



○ City center

● 2015

● 2013

Source: NAHP Study

KETERJANGKAUAN masih menjadi hambatan utama untuk meningkatkan *outcome* perumahan secara signifikan di Indonesia

Household Decile	Monthly HH Income (m, IDR)	Monthly Payment Capacity (m, IDR)	Estimated Affordable Home Price w/ Loan Alone (m, IDR)	Estimated Affordable Home Price w/ Down Payment (m, IDR)
10	13.9	5.6	463 million	661 million
9	7	2.6	216 million	209 million
8	5.2	1.8	99 million	110 million
7	4.2	1.4	74 million	82 million
6	3.6	1.1	44 million	49 million
5	3.1	0.9	38 million	43 million
4	2.6	0.7	18 million	19 million
3	2.1	0.5	13 million	14 million
2	1.8	0.4	6.7 million	6.7 million
1	1.2	0.1	2.3 million	2.3 million



Can Afford
Commercial Units



Can Afford Formal Housing
with Subsidy Enhancements



Cannot Afford Even
Basic Core Unit

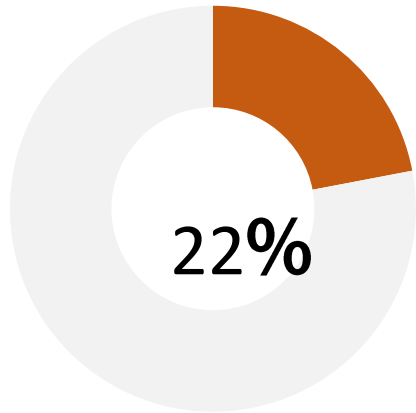
SANITASI DALAM PERUMAHAN

Table 1. Housing Units with Substandard Characteristics.

Nationwide	Overcrowding	Lack of Basic Utilities			Substandard Construction Materials				Combination of Substandard Characteristics	
Decile	<7.2m2	No Water	No Sanitation	No Water & Sanitation	Roof	Wall	Floor	All Sub-standard	Overcrowded or No Basic Utilities or Substandard Material	Overcrowded and No Basic Utilities and Substandard Material
1	27%	27%	61%	22%	12%	19%	22%	4%	69%	7%
2	19%	21%	51%	16%	9%	16%	16%	2%	60%	4%
3	15%	18%	46%	13%	9%	14%	13%	2%	55%	2%
4	13%	16%	43%	12%	8%	11%	10%	1%	51%	1%
5	12%	14%	38%	9%	9%	8%	9%	1%	48%	1%
6	8%	12%	32%	8%	9%	8%	7%	1%	42%	1%
7	8%	11%	29%	7%	10%	7%	6%	1%	40%	0%
8	7%	8%	22%	5%	10%	4%	4%	0%	35%	0%
9	5%	6%	16%	3%	10%	3%	2%	0%	29%	0%
10	3%	3%	9%	1%	10%	1%	1%	0%	21%	0%
Total	12%	14%	35%	10%	10%	9%	9%	1%	45%	2%
No. of Units	7,543,340	8,758,632	22,316,246	6,266,012	6,125,329	5,852,233	5,804,551	785,497	28,915,894	1,112,974

3 dari 10 rumah tangga tidak memiliki sanitasi yang layak

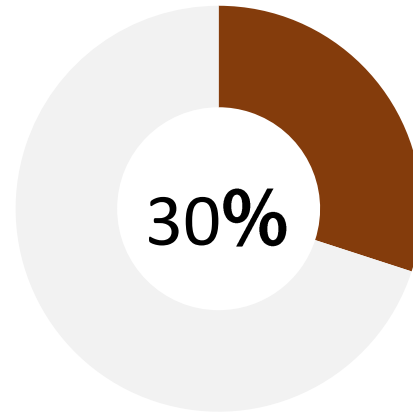
SANITASI DALAM PERMUKIMAN KUMUH



atau

29juta

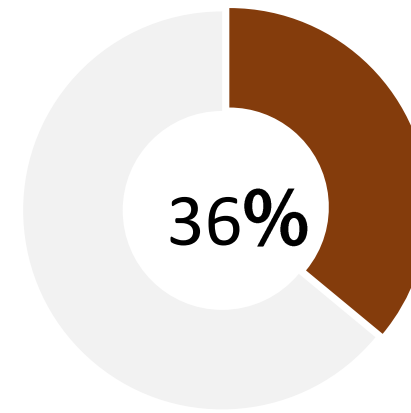
masyarakat perkotaan tinggal di permukiman kumuh tanpa/dengan layanan dasar minimal



atau

9juta

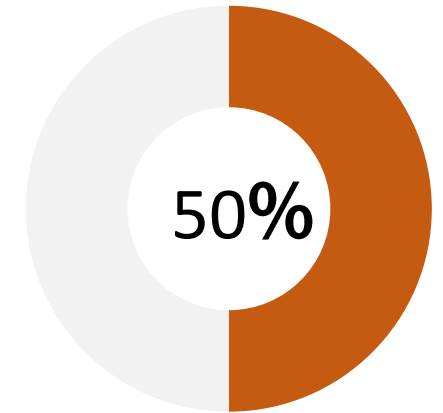
masyarakat permukiman kumuh tinggal di permukiman dengan akses **air minum** yang buruk



atau

11juta

masyarakat permukiman kumuh tinggal di permukiman dengan akses **sanitasi** dan **drainase** yang buruk



atau

13,5juta

masyarakat miskin tinggal di permukiman kumuh dengan *sub-standard housing*, akses buruk terhadap pelayanan dasar, rentan kesehatan dan bencana, dll.



Penyediaan rumah memiliki *business process* yang sangat panjang dan beragam

- Dibangun sendiri masyarakat
- Dibangun pengembang, lalu dibeli masyarakat
- Difasilitasi pemerintah vs tidak difasilitasi pemerintah



Pembangunan infrastruktur publik lain cenderung lebih sederhana.:

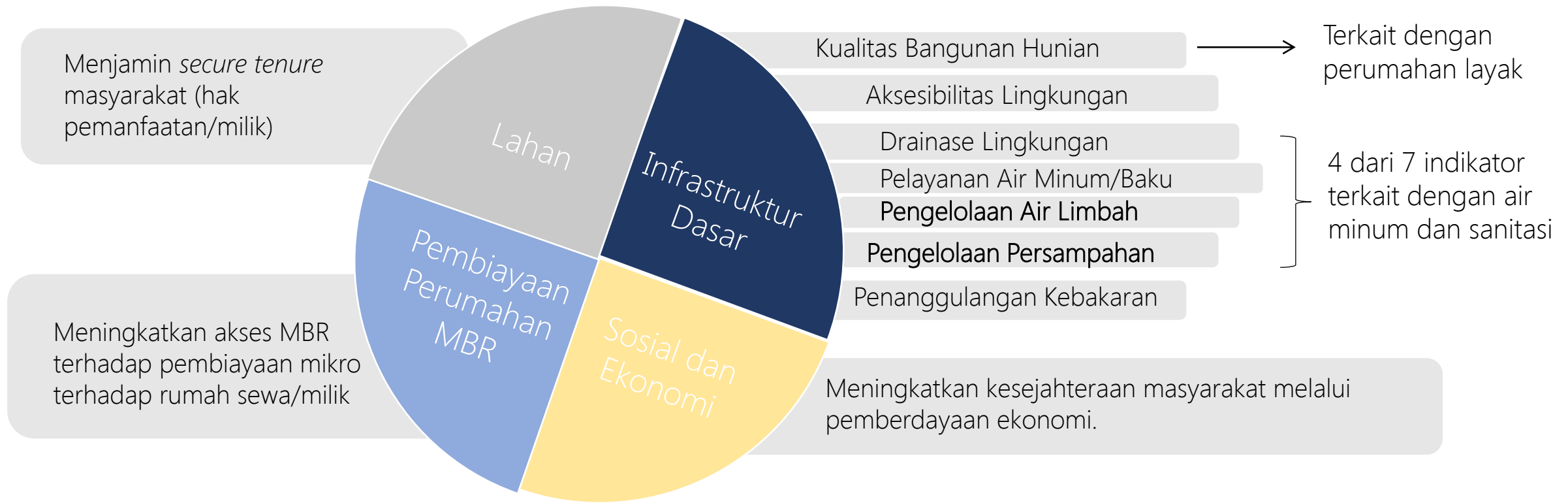
- Hanya beberapa pihak yang terlibat
- Dibangun → dikelola → dioperasikan dan dipelihara oleh pemerintah/lembaga yang ditunjuk

PERUMAHAN MERUPAKAN ISU YANG *COMPLEX* DAN *COMPLICATED*

Tidak bisa diselesaikan hanya dengan membagi urusan dan tidak ada lembaga yang bisa menanganinya sendirian.

DIBUTUHKAN KOLABORASI ANTAR SEKTOR

Kolaborasi Pengentasan Permukiman Kumuh



Kota Tanpa Kumuh hanya dapat terwujud jika ada sistem yang **dapat memastikan seluruh komponen pengentasan** (lahan, pembiayaan, infrastruktur dasar, dan penghidupan berkelanjutan) dapat tersedia/terwujud.

TIDAK DAPAT BERJALAN SENDIRI, BUTUH KOLABORASI BERBAGAI SEKTOR

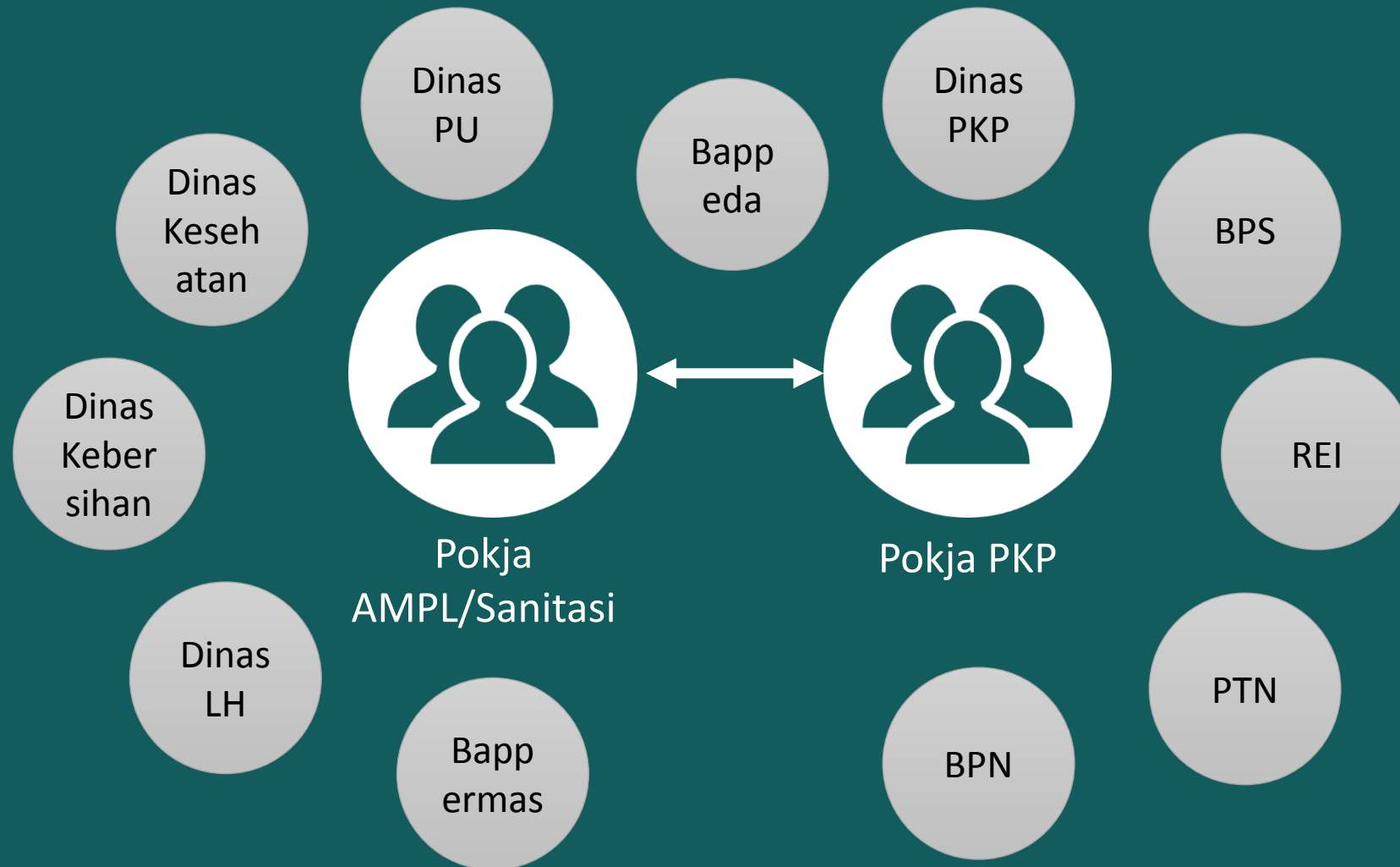
LANGKAH KOLABORASI 1 - PERENCANAAN



1. Sistem sanitasi (tahapan pengembangan sanitasi dan opsi teknologi) dalam SSK menjadi acuan dalam perencanaan penanganan/pencegahan kumuh
2. Overlap area prioritas penanganan sanitasi dan kawasan kumuh → **PRIORITAS UTAMA** di sektor sanitasi dan penanganan kumuh

Air Minum dan Sanitasi merupakan komponen wajib karena terkait kesehatan masyarakat

LANGKAH KOLABORASI 2 – WADAH KOORDINASI



LANGKAH KOLABORASI 3 – IMPLEMENTASI KEGIATAN



RKP 2018

- DAK Penugasan Air minum dan Sanitasi untuk Kawasan Kumuh Perkotaan
- DAK Reguler Perumahan untuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Permukiman Kumuh Perkotaan

“Permukiman kumuh adalah bentuk kegagalan kebijakan, pemerintahan yang buruk, korupsi, peraturan yang tidak tepat, pasar lahan yang tidak berfungsi, sistem pembiayaan yang tidak responsif dan kekurangan kemauan politik yang mendasar. Setiap kegagalan ini menambah beban pada masyarakat yang sudah terbebani kemiskinan dan menghambat potensi pembangunan manusia yang dapat ditawarkan oleh kehidupan kota” (<http://web.mit.edu>)

TERIMA KASIH

Direktorat Perkotaan, Permukiman dan Perumahan
Kementerian PPN/BAPPENAS
Gedung Utama Lantai 3, Jalan Taman Suropati No.2 Jakarta
Telp/Fax: (021) 3149635 Email: perkim.bappenas@gmail.com